

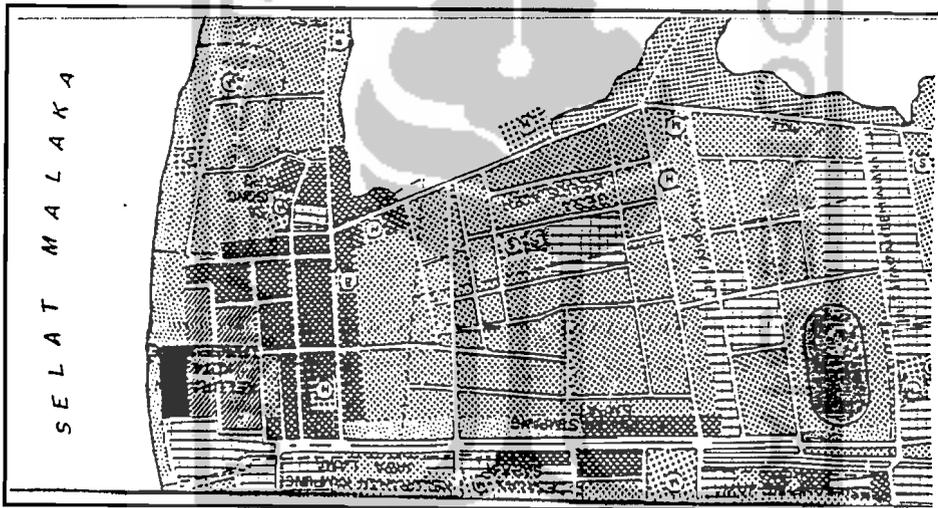
BAB III
PERSPEKTIF KOTA LHOKSEUMAWE SEBAGAI
PENGEMBANGAN SENI PERTUNJUKAN DI ACEH

3.1. Tinjauan Kota

Lhokseumawe merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Utara yang terletak di sebelah Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kabupaten Aceh Utara berbatasan dengan :

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie
- Sebelah Utara dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan dengan Aceh Tengah



Gambar 3.1 Peta Kota Lhokseumawe

Jumlah penduduk Lhokseumawe pada tahun 1994 sebesar 290.636 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 4,5 % pertahun. Kota Lhokseumawe sebagai Kota Industri banyak mengundang arus migrasi masuk baik dalam tahap pembangunannya maupun tahap operasionalnya. Berkaitan dengan pengembangan Kota Lhokseumawe sebagai kota industri, perlu dikembangkan pada periode tahun mendatang kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain yang belum berkembang sebagai pendukung sektor industri.

3.2. Konsep Tata Ruang Kota

Struktur tata ruang kota dipengaruhi oleh kecenderungan perkembangan kota. Sedangkan perkembangan kota dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain:

- a. Laju pertumbuhan penduduk, akan mempengaruhi perkembangan kegiatan kota dan selanjutnya akan mempengaruhi pula perkembangan wilayah pembangunan kota. Dengan kata lain, perkembangan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kebutuhan lahan untuk menampung kegiatannya.
- b. Pola tata guna lahan, akan memperlihatkan hubungan timbal balik antara penduduk dengan elemen kegiatan kota, yang akan mempengaruhi arah perkembangan penggunaan lahan di masa yang akan datang.
- c. Pola jaringan lahan, akan mempengaruhi/mengubah penggunaan lahan di suatu wilayah, yang selanjutnya juga akan mempengaruhi arah perkembangan kota.
- d. Potensi sumber daya alam akan berpengaruh sangat besar pada perkembangan kota khususnya pada struktur perekonomian dan perkembangan fisik kota.

Hal tersebut berkaitan dengan alokasi kegiatan kota dan selanjutnya mempengaruhi penentuan konsep tata ruang kota. Dengan demikian, dasar pertimbangan penyusunan konsep tata ruang kota adalah meliputi penentuan komponen utama pembentuk ruang kota, penentuan tingkat hubungan fungsional antar kegiatan, penentuan skala dan pelayanan setiap elemen kegiatan kota.

3.2.1 Komponen Utama Pembentuk Ruang Kota

Pembentukan kota didukung oleh komponen kegiatan-kegiatan kota yang dikelompokkan atas kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kedua kegiatan ini memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan kota.

Komponen pembentuk ruang kota dapat dibedakan atas 5 elemen kota, yaitu ⁷:

- a. **Wisma**, adalah lahan yang diperuntukkan bagi bangunan tempat tinggal dan berfungsi sebagai pelindung terhadap cuaca dan keadaan sekelilingnya.

⁷ Rencana Umum Tata Ruang Kota, Pemda TK II Aceh Utara, Tahun 1995/1996, hal 3

Diwujudkan dalam bentuk perumahan dan dalam skala yang lebih luas berbentuk pemukiman.

- b. **Karya**, segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dalam hal ini berupa lapangan pekerjaan atau tempat berusaha.
- c. **Marga**, bagian kota yang menciptakan hubungan antar satu kegiatan dengan kegiatan lain atau satu kawasan dengan kawasan lainnya dan mendukung terwujudnya kegiatan kota agar berjalan dengan baik.
- d. **Penyempurna**, bentuk kegiatan kota yang bertujuan meningkatkan kualitas penghuni kota, seperti mesjid, sekolah, rumah sakit dan sebagainya.
- e. **Suka**, bentuk kegiatan kota yang bersifat sebagai pelayanan bagi penduduk kota, diwujudkan dalam bentuk kegiatan rekreasi, misalnya gedung bioskop, gedung pertunjukan dan taman-taman hiburan.

3.2.2 Hubungan Fungsional Antar Elemen Kegiatan Kota

Masing-masing elemen kegiatan kota, baik elemen utama maupun elemen penunjang memperlihatkan hubungan fungsional. Tingkat hubungan fungsional tersebut dinyatakan dalam ukuran kuat, sedang atau lemah, serta mempengaruhi nilai kemudahan pencapaian (akseibilitas) antar kedua elemen kegiatan tersebut, sehingga mempengaruhi alokasi kegiatan dan penataan ruang kota.

Komponen utama kota umumnya memiliki hubungan fungsional yang tinggi, sehingga penempatan (alokasi) elemen kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang memiliki skala pelayanan yang tinggi (Regional/lokal) ditempatkan pada areal yang memiliki akseibilitas tinggi terhadap seluruh wilayah kota, yaitu pusat kota (misalnya kegiatan perdagangan dan jasa).
- b. Untuk menjaga keseimbangan kehidupan di kota, kegiatan yang bersifat polutif ditempatkan pada daerah yang terpisah dari kehidupan kota (misalnya industri migas dan bandar udara).
- c. Kegiatan yang memanfaatkan sarana dan prasarana bersama-sama ditempatkan secara berkelompok misalnya (perdagangan dan bandar udara).

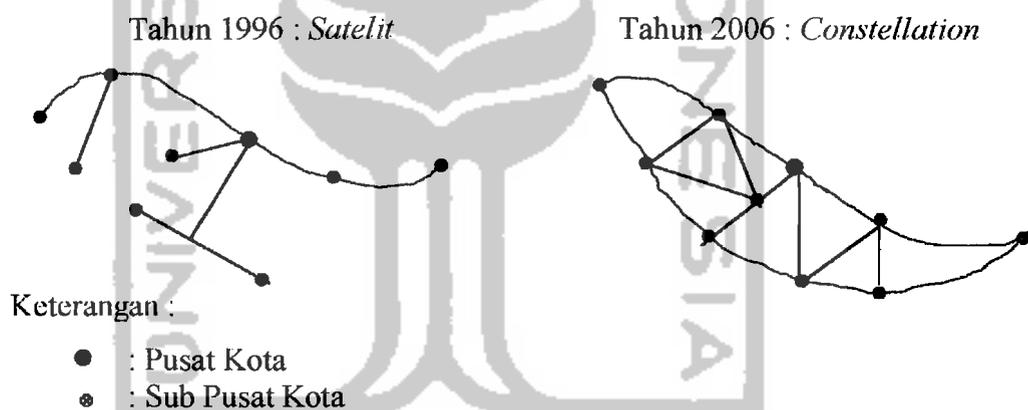
3.3. Rencana Struktur Tata Ruang Kota

3.3.1 Bentuk dan Struktur Tata Ruang Kota

Bentuk kota adalah perwujudan pola tata ruang/spasial atau keteraturan elemen-elemen individual atau kelompok bangunan-bangunan dan penggunaan lahan (atau secara keseluruhan fisik binaan/lingkungan buatan), penyebaran aktivitas ekonomi, sosial dan pranata umum yang ada di daerah perkotaan.

Ditinjau dari evolusi perkembangan bentuk kota, Kota Lhokseumawe saat ini berbentuk *satelit*, berupa satu pusat utama (pusat kota) dikelilingi oleh beberapa sub pusat atau bagian wilayah kota (BWK), namun antara sub pusat satu dengan lainnya belum memiliki interaksi/hubungan.

Berdasarkan hasil analisis kecenderungan perkembangan di masa mendatang, Kota Lhokseumawe diperkirakan akan berbentuk *constellation*, berupa penyempurnaan bentuk *satelit* yang ada, yakni antara sub-sub pusat BWK mulai terbentuk hubungan satu sama lain



Gambar 3.3 : Bentuk Kota Lhokseumawe dan Wilayah Sekitarnya
 Sumber : RUTRK Pemda TK II Aceh Utara, Tahun 1995/1996

Bentuk *constellation* merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan perkembangan antara seluruh bagian wilayah kota secara menyeluruh, dengan dasar pertimbangan :

- adanya jalan elak (alternatif) akan mendorong perkembangan wilayah burit (*hinterland*) dan meningkatkan aksebilitas antara sub-sub pusat BWK
- Meningkatkan kemudahan pencapaian (aksebilitas) antar sub-sub pusat lingkungan (kota *satelit*)

- Terjadinya perkembangan sub-sub pusat BWK dan lingkungan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alamnya.

Struktur suatu kota mengandung pengertian kombinasi antara bentuk kota dan tingkah laku serta interaksi antara sub sistem dengan sekelompok aturan-aturan organisasi sosial yang mengikat semua sub sistem yang terdapat di kota itu.

3.3.2 Arah Pengembangan Kota

Peningkatan jumlah penduduk Kota Lhokseumawe dan wilayah sekitarnya pada Tahun 2006, akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang bagi pengembangan fisik kota. Peningkatan kebutuhan ruang ini harus dialokasikan bagi kegiatan (elemen) utama Kota Lhokseumawe tersebut, yaitu wisma, karya dan marga. Sesuai karakteristik wilayah rencana, pengembangan Kota Lhokseumawe diarahkan sesuai dengan sifat dan keterbatasan lahan yang ada. Penempatan elemen kegiatan utama kota dialokasikan pada lahan dengan kemampuan lahan agak baik, baik dan baik sekali, yaitu di sekitar pantai antara Kecamatan Banda Sakti dan Dewantara, dan sebagian Kecamatan Muara Batu. Kemampuan di antara Kecamatan Muara Batu dan Blang Mangat adalah sedang, dengan kemiringan lahan $> 15 \%$. Hal ini menyulitkan bagi perkembangan kota, sehingga pemanfaatannya diarahkan bagi kawasan hutan (hijau).

3.4. Prospek Pengembangan Daerah Lhokseumawe di Bidang Seni Pertunjukan

3.4.1 Potensi Daerah di Bidang Seni Pertunjukan

Daerah Lhokseumawe memiliki potensi di bidang seni dan budaya yang cukup besar, khususnya di bidang kesenian. Potensi-potensi ini berupa sanggar-sanggar kesenian yang berorientasikan kesenian tradisional Aceh maupun sanggar-sanggar kesenian kreasi baru dan modern, seperti seni musik, tari dan seni teater/drama. Sanggar-sanggar yang tersebar di Wilayah Lhokseumawe ini sebagian sudah terorganisasi secara profesional, namun sebagian besar masih bersifat tradisional yang biasanya hanya muncul pada saat ada acara-acara besar yang berskala kabupaten, propinsi, nasional maupun internasional.

Sanggar-sanggar tradisional ini masih memiliki keaslian dan kemurnian kesenian tradisional dan belum dipolesi dengan kreasi-kreasi baru seperti sanggar-sanggar lainnya. Namun sanggar-sanggar ini sulit berkembang akibat keterbatasan dana kelompok sanggar, pengelolaan yang kurang profesional serta kurangnya sarana dan prasarana tempat latihan dan pentas pertunjukan agar bisa ditampilkan dalam frekwensi yang teratur. Di Samping itu seniman-seniman sanggar ini biasanya berprofesi utama sebagai pegawai/karyawan perusahaan swasta atau hanya sebagai petani dan nelayan, sehingga sulit berkonsentrasi secara maksimal pada kesenian dan sanggar.

Kondisi yang cukup memprihatinkan di atas, apabila tidak ditangani secara lebih serius oleh pemerintah maupun instansi yang terkait, bisa mengakibatkan semakin mudarnya nilai-nilai keaslian dan kemurnian kesenian tradisional.

Tabel 3.1 Jenis Kesenian dan Jumlah Kelompok Kesenian / Sanggar Di Lhokseumawe dan Aceh Utara

POTENSI KESENIAN	JUMLAH KELOMPOK KESENIAN
a). Seni Tari	
Tari Kerakyatan	19
Tari Modern / Kontemporer	7
b). Seni Musik	
Musik Kerakyatan	5
b). Seni Teater dan Sastra	
Teater Tradisional	2
Tari Modern	3
Seni Sastra Daerah	2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Aceh Utara

Kesenian yang ada di Lhokseumawe adalah seni pertunjukan tradisional dan modern. Sebagai salah satu kota dalam wilayah Propinsi Aceh yang mendapat predikat istimewa dalam tiga bidang, yaitu Agama, Pendidikan dan Kebudayaan/Adat Istiadat, didalamnya hidup berbagai macam kesenian tradisional. Bahkan yang tergolong seni pentas mempunyai pendukung yang cukup kuat (banyak).

3.4.2 Prospek Pengembangan Seni Pertunjukan di Lhokseumawe

Industrialisasi merupakan bagian dari sistem pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Namun perubahan dari era agraris menuju era industri di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya, terjadi sangat cepat dan tanpa persiapan sosial yang matang, sehingga berpotensi menjadi titik awal timbulnya konflik sosial. Kondisi ini berdampak lebih jauh sehingga terjadi kesenjangan sosial, kecemburuan sosial sampai akhirnya timbul konflik sosial.

Untuk mengantisipasi akibat yang lebih jauh, masyarakat perlu dipersiapkan agar dapat berperan serta dalam perkembangan yang terjadi dengan :

- ☛ Pengembangan pendidikan formal, yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan, sesuai dengan perkembangan yang diharapkan.
- ☛ Pengembangan pendidikan non formal, terutama untuk mentransformasikan masyarakat tradisional menjadi masyarakat agraris modern, urban atau industri.

Pengembangan pendidikan non formal tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Ulama maupun pihak seniman, melalui karya-karya seni yang diisi dengan pesan-pesan sosial sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Karena bila dikaitkan dengan upaya penanggulangan dampak negatif kegiatan industri, terutama masalah sosial, keberadaan ulama dan seniman dapat menjembatani pihak-pihak yang saling berkaitan, yaitu masyarakat, pemerintah dan Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) yang akan menampung permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Dalam hal ini mereka berperan sebagai :

- ☛ Mediator, untuk menyampaikan misi kegiatan
- ☛ Motivator, yaitu menumbuhkan motivasi pada masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Dalam hal ini para seniman bisa menggunakan bahasa seni yang dikenal sebagai bahasa universal dalam setiap kesempatan maupun dalam kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan para seniman.

Dengan melibatkan para seniman daerah dalam upaya pengembangan masyarakat dalam pembangunan, dengan sendirinya pihak pemerintah dan instansi terkait dituntut untuk lebih memperhatikan kondisi bidang seni dan budaya yang akhir-akhir ini kondisinya agak memprihatinkan. Dengan pengelolaan yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana latihan yang memadai, sanggar-sanggar kesenian tradisional bisa menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai tradisional untuk dikemas dan disajikan dalam bentuk yang lebih menarik sehingga kembali bisa dinikmati masyarakat dan tidak kalah bersaing dengan kesenian modern, dalam hal ini khususnya seni pertunjukan.

Pada akhirnya, dengan segala daya upaya yang dilakukan, baik oleh pihak pemerintah maupun instansi yang terkait serta usaha dari para pelaku seni itu sendiri. Seni pertunjukan dapat berkembang dan menjadi salah satu ujung tombak pendidikan sosial di samping pendidikan formal, serta bisa menjadi komoditas wisata yang menjadi program pemerintah untuk lebih memperkenalkan seni budaya tradisional Daerah Lhokseumawe dan Aceh pada khususnya untuk lebih memperkuat khazanah kebudayaan nasional.